

Pola Pemanfaatan Ruang Usaha dari UMKM Kaki Lima di Koridor Inspeksi Banjir Kanal Timur Kecamatan Duren Sawit, DKI Jakarta

Nia Rizky Rohmani, Fadjar Hari Mardiansjah, dan Muhammad Indra Hadi Wijaya
 Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, PSDKU Pekalongan, Sekolah Vokasi
 Universitas Diponegoro
e-mail: niarizky48@gmail.com

Abstrak—Sejalan dengan pembangunan perkotaan saat ini, peningkatan aktivitas masyarakat menyebabkan peningkatan kebutuhan ruang, termasuk kebutuhan akan infrastruktur Banjir Kanal Timur (BKT) sebagai infrastruktur pengendali banjir yang turut menyediakan ruang terbuka di wilayah Kota Jakarta Timur. Para pedagang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kaki lima ikut memanfaatkan ruang tersebut sebagai lokasi berdagang. Berbasis pada pemikiran bahwa keberadaan aktivitas perdagangan tersebut dapat berpengaruh terhadap ruang BKT, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola perilaku pemanfaatan ruang usaha yang dilakukan oleh UMKM kaki lima di kawasan BKT serta menganalisis pola gangguannya. Tujuan tersebut dicapai dengan melakukan analisis deskriptif kuantitatif dari metode observasi yang dilakukan kepada fenomena pemanfaatan ruang terbuka BKT oleh aktivitas perdagangan yang berkembang tersebut. Pengamatan dilakukan dengan observasi mendalam terhadap setiap aktivitas perdagangan yang berlangsung pada lokasi studi di sore dan malam hari. Hasil penelitian menunjukkan pola karakteristik aktivitas UMKM kaki lima umumnya menggunakan sarana berupa gelaran/alas yang dapat dibongkar pasang dan gerobak. Pemanfaatan ruang koridor banyak ditemukan pedagang pakaian dan makanan siap saji yang tersebar mengikuti sirkulasi koridor yang memanjang. Berdasarkan analisis, pedagang beraktivitas secara menetap dan semi menetap sehingga dari aktivitas yang dilakukan berpotensi menimbulkan gangguan. Pola gangguan yang muncul adalah potensi hambatan arus lalu lintas akibat kerumunan pengunjung dan/atau pedagang beserta sarananya yang berjualan pada sore dan malam hari. Gangguan yang ada memberikan dampak pada akses pintu keluar masuk ke kawasan yang penuh/sesak; badan jalan menjadi sempit; dan terjadinya perselisihan akibat dari gangguan konflik kepentingan. Kerjasama antara UMKM kaki lima dengan pemerintah kota diperlukan untuk mengoptimalkan pola gangguan yang ditimbulkan. Beberapa yang dapat dilakukan seperti bekerjasama dalam menjaga dan mengelola kawasan Koridor BKT, melakukan pemberdayaan kepada paguyuban pedagang kaki lima, pengaturan waktu berdagang guna mengakomodasi kegiatan pedagang, memberlakukan suatu sistem yang dapat mencegah gangguan yakni sistem *pop up/* bongkar pasang pada sarana yang digunakan, serta melakukan optimalisasi pedagang pada sisi utara BKT.

Kata Kunci— Aktivitas Informal Koridor BKT, Duren Sawit Jakarta, Pola Gangguan, Pola Pemanfaatan Ruang Usaha, UMKM Kaki Lima.

I. PENDAHULUAN

Ruang sejatinya dibutuhkan sebagai tempat manusia melakukan kegiatan. Dimana ruang sebagai wadah yang memiliki batas fisik dan dapat digunakan untuk melakukan kegiatan masyarakat umum disebut ruang terbuka publik.

Pada era modern sekarang ini, ruang publik diperlukan untuk mendukung berbagai kegiatan seperti kegiatan sosial dan ekonomi. Fungsi sosial diwujudkan dengan ruang yang dimiliki masyarakat secara bersama sebagai tempat untuk berinteraksi satu sama lain antar masyarakat dan dengan keluarga, saling berkomunikasi, dan juga menumbuhkan budaya kebersamaan melalui kegiatan bersama. Sedangkan fungsi ekonomi dari ruang terbuka bagi masyarakat terbangun dengan berkembangnya ruang sebagai tempat berlangsungnya aktivitas ekonomi dan/atau kegiatan wisata. Sehingga dapat menjadi sentra ekonomi dan kawasan wisata.

Banjir Kanal Timur merupakan salah satu contoh konkrit dari fenomena pemanfaatan ruang terbuka publik sebagai sentra ekonomi. Dapat diketahui bahwa infrastruktur BKT berupa saluran besar berfungsi untuk pengendali banjir pada wilayah DKI Jakarta, melintasi wilayah Kota Jakarta Timur dan Jakarta Utara dengan panjang 23,6 kilometer dan memiliki lebar 100 – 300 meter [1]. Pemanfaatan dari ruang kanal ini bersifat multifungsi dimana saluran yang ada memiliki fungsi utama untuk mengurangi banjir dan jalan tepi saluran memiliki fungsi dalam pemeliharaan saluran. Namun, akibat rendahnya intensitas pemeliharaan yang dilakukan, perkembangan berikutnya memperlihatkan adanya fungsi lain sebagai ruang usaha dari sektor informal UMKM kaki lima karena jalan tepi saluran BKT tersebut memiliki aksesibilitas yang tinggi.

Kegiatan ekonomi informal adalah sektor yang sangat diuntungkan dengan adanya kawasan strategis lingkungan DKI Jakarta. Sesuai amanat pada RTRW Jakarta Tahun 2030 yang menyatakan bahwa Banjir Kanal Timur merupakan kawasan strategis lingkungan, Banjir Kanal Timur menjadi salah satu wadah bagi pedagang UMKM kaki lima sebagai target lokasi pemasaran. Salah satu ciri utama dari kegiatan ekonomi informal adalah modal usaha yang relatif kecil [2]. Hal tersebut menyebabkan para pelaku UMKM kaki lima memanfaatkan ruang publik sebagai tempat usaha karena belum mampu menyewa tempat usaha secara khusus. Mengingat tingginya harga sewa lahan dan keterbatasan modal hingga akhirnya terpaksa memanfaatkan lahan yang tersedia seperti BKT.

Pertumbuhan jumlah pedagang secara pesat bisa terjadi, sehingga akan sulit dikendalikan dan akhirnya mempengaruhi pemanfaatan ruang. Dapat dikatakan keberadaan UMKM kaki lima dapat menciptakan konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan ekonomi, yakni para pedagang yang menjamur pada ruang publik guna menunjang usahanya mengakibatkan terus bertambahnya jumlah pelaku sektor informal dan dapat

menyebabkan pengurangan kapasitas ruang untuk pelaksanaan fungsi sesungguhnya. Kondisi tersebut banyak menimbulkan permasalahan baru bagi lingkungan, diantaranya keamanan, kenyamanan, dan keindahan kota [3]. Adanya kegiatan ekonomi informal yang dilakukan di ruang publik dapat menciptakan kondisi kumuh sehingga menyebabkan penurunan fungsi estetika kota. Konflik yang paling umum terjadi adalah munculnya parkir liar di bahu jalan yang menciptakan gangguan pada lalu lintas. Selain menimbulkan konflik, ciri dari sektor informal ini tidak dibatasi dengan kualifikasi pendidikan tertentu untuk menjalankan usahanya. Keberadaan sektor informal UMKM kaki lima juga dapat menjadi potensi bagi wilayah dalam hal kesejahteraan warga yakni mengurangi angka pengangguran.

Pola pemanfaatan ruang dapat diindikasikan sebagai persebaran kegiatan-kegiatan budidaya dan perlindungan beserta keterkaitan untuk mewujudkan sasaran pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya sesuai potensi sumberdaya alam, manusia, dan buatan [4]. Pemanfaatan pada ruang kota umumnya didominasi oleh pemanfaatan untuk kegiatan non-pertanian dan menyebabkan minimnya ruang terbuka. Pemanfaatan ruang sebagai ruang terbuka publik sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan sosial masyarakat yakni sebagai wahana interaksi sosial, ruang terbuka publik diharapkan dapat mempertautkan seluruh anggota masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya [5]. Pemanfaatan ruang Kota Jakarta Timur ditinjau dari RTRW Kota Jakarta Timur bahwa pemanfaatannya sebagai pusat kegiatan tersier. Pusat kegiatan tersier adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kota/kabupaten administrasi atau beberapa kecamatan. Sesuai dengan amanat pada RTRW DKI Jakarta Tahun 2030, perwujudan kawasan sepanjang Banjir Kanal Timur dijadikan sebagai kawasan strategis lingkungan. Kawasan ini memiliki fungsi utama prasarana pengendali banjir serta memiliki fungsi lain yang dapat dimanfaatkan untuk rekreasi, transportasi, penyediaan sumber air bersih, dan kegiatan kepentingan ekonomi. Artinya pada kawasan Banjir Kanal Timur dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi yang tidak mengganggu lingkungan.

Pola pemanfaatan ruang jika dilihat secara mikro pada karya ilmiah ini adalah penggunaan suatu area untuk mewadahi aktivitas UMKM kaki lima. Definisi mengenai pola pemanfaatan ruang adalah proses, cara, dan perbuatan untuk menggunakan area tertentu dalam suatu bentuk (struktur) yang tetap atau berulang sehingga dapat dilihat pola pemanfaatannya [6]. Kajian mengenai pemanfaatan ruang oleh sektor informal dijabarkan dari pola pengelolaan aktivitas UMKM kaki lima. Pengelolaan UMKM kaki lima dapat diakukan dengan salah satu cara yakni stabilisasi/pengaturan berupa penataan fisik atau penempatan lokasi UMKM kaki lima pada suatu titik diantaranya adalah peruntukkan dalam ruang terbuka; pembebasan atau penutupan jalan-jalan tertentu; pemanfaatan bagian tertentu dari jalan atau trotoar; multifungsi ruang terbuka; dan pemanfaatan ruang parkir pada waktu tertentu [4].

Ruang terbuka publik adalah ruang non-terbangun dalam kota berguna untuk meningkatkan kualitas nilai estetika, lingkungan, dan sosial kesejahteraan masyarakat yang pemanfaatannya bebas atau umum sepanjang waktu [7]. Stephen Carr menyebutkan ruang terbuka publik adalah

simpul dan sarana komunikasi pengikat sosial untuk menciptakan interaksi antarkelompok masyarakat sehingga ruang terbuka publik seharusnya memiliki nilai kualitas yakni harus responsif, demokratis, dan bermakna [7]. Jadi, ketiga aspek tersebut menjelaskan bahwa ruang publik adalah fasilitas umum yang bersifat nyaman serta bebas dari gangguan pengguna lain sebagai wadah untuk aktivitas rekreasi dan olahraga baik secara individu maupun berkelompok dapat berupa taman, lapangan, dan sebagainya.

Tipologi ruang terbuka publik memiliki beragam jenis yaitu terdiri dari taman umum; lapangan dan plaza; taman peringatan; pasar; jalan; lapangan bermain; ruang terbuka untuk masyarakat; jalan hijau dan jalan taman; atrium/pasar tertutup; pasar/ pusat perbelanjaan pusat kota; *found spaces/everyday open space*; kawasan tepian sungai [8]. Sedangkan fungsi ruang terbuka publik antara lain memiliki fungsi sosial dan fungsi ekologis [9]. Mengutip kepada teori Darmawan mengenai fungsi ruang terbuka publik lainnya yakni sebagai pusat interaksi dan komunikasi masyarakat, menampung koridor-koridor jalan yang menuju kearah ruang publik tersebut dan sebagai ruang pengikat, sebagai tempat kegiatan pedagang kaki lima (PKL), dan sebagai paru-paru kota [4].

Terdapat penelitian terdahulu menyatakan emanaftaan ruang oleh pedagang eceran kecil untuk aktivitas ekonomi, memiliki dampak terhadap kualitas fisik dan non fisik ruang publik [10]. Selain itu, PKL ternyata memberikan manfaat dan juga dampak negatif [11]. Adanya PKL memberikan manfaat menjadi mudah dalam pemenuhan kebutuhan serta dampak negatifnya yang timbul adalah mengurangi jalanan yang sesak dan macet pada jalur pejalan kaki, trotoar menjadi sempit, parkir menjadi sulit, kekumuhan karena lingkungan kotor, tidak aman, dan mengganggu kondisi visual. Pada penelitian lain ditemukan bahwa adanya PKL berpotensi terhadap konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan ekonomi serta dapat berpengaruh terhadap keserasian dan kenyamanan lingkungan akibat dari penurunan fungsi ruang publik [12].

Sektor informal adalah sebuah alternatif pekerjaan yang banyak digeluti oleh sekelompok masyarakat di negara berkembang. Tidak dapat dipungkiri sektor informal begitu mudah dijumpai di negara berkembang seperti Indonesia contohnya saja usaha kecil yakni UMKM kaki lima. Ciri-ciri sektor informal mengutip kepada Yustika [2] yang mana sektor informal tergolong menjadi sektor pendukung yang sifatnya bertolak belakang dengan sektor formal seperti kegiatan usaha yang tidak terorganisir dengan baik; tidak mempunyai ijin usaha; pola kegiatan usaha yang tidak teratur; kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah biasanya tidak sampai pada sektor ini; teknologi yang digunakan tradisional; skala pelayanan dan modal yang relatif kecil; unit usaha berganti-ganti; tidak memerlukan pendidikan formal; tenaga kerja dari keluarga maupun teman dekat; hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke bawah [2].

Karakteristik sektor informal kaitannya dengan sarana fisik yang digunakan, jenis usahanya, pola pelayanan, dan pola penyebarannya. Bentuk sarana fisik yang digunakan UMKM kaki lima menjadi enam jenis yaitu kios, warung semi permanen, gerobak/kereta dorong, jongko/meja, gelaran/alas, pikulan/keranjang [13]. Sedangkan jenis dagangan yang

diperdagangkan oleh pelaku UMKM kaki lima bergantung dengan aktivitas yang ada terdiri dari bahan mentah dan setengah jadi, makanan siap konsumsi, non-makanan, dan jasa [13]. Adapun pola penyebaran aktivitas UMKM kaki lima terbagi menjadi dua jenis dimana pola penyebaran memanjang dan pola penyebaran mengelompok [13]. Sementara pola pelayanan pedagang sektor informal dibedakan atas pedagang menetap, pedagang semi menetap, dan pedagang keliling [13].

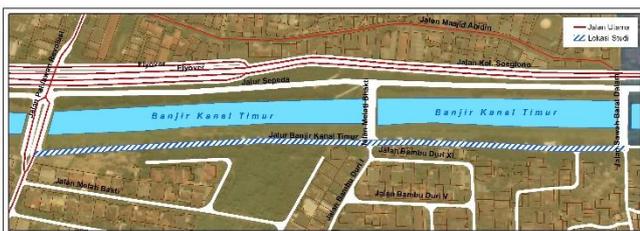
Banjir Kanal timur atau biasa disebut dengan BKT adalah kanal buatan yang segera dibuat untuk mengatasi banjir di wilayah DKI Jakarta akibat hujan lokal dan aliran dari hulu [14]. Ruang kota memerlukan elemen pendukung (*street furniture*) untuk penataan ruang publik diantaranya lampu, signage, ground cover, bangku, kios, tanaman peneduh, dan tempat sampah [15]. Elemen fisik yang biasa dipergunakan untuk melakukan aktivitas berdagang oleh UMKM kaki lima di BKT adalah jalan inspeksi serta jembatan. Saluran BKT yang ada akan menjadikan wilayah bagian timur dan utara DKI Jakarta menjadi kota air atau *waterfront city*. Pembangunan dapat memberikan dampak yang beragam, realisasi pembangunan Banjir Kanal Timur dapat memberikan dampak yang positif yakni memacu pertumbuhan kota dan mampu membuka isolasi daerah [16]. Oleh karena itu, dampak positif yang ada sangat harus dipertahankan serta didorong keberlangsungannya agar menjadi potensi yang baik untuk kedepannya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan tinjauan pustaka tersebut, maka studi yang dilakukan bertujuan untuk menganalisis pola aktivitas dan perilaku pemanfaatan ruang usaha yang dilakukan oleh UMKM kaki lima di kawasan BKT serta mengamati pola gangguannya. Tujuan ini dicapai dengan melakukan beberapa hal sebagai sasaran antara lain, memahami kondisi umum wilayah baik secara fisik maupun non-fisik, mengidentifikasi pola aktivitas dan perilaku pemanfaatan ruang usaha oleh UMKM kaki lima yang dilakukan, dan mengidentifikasi pola gangguan yang ditimbulkan dari adanya aktivitas UMKM kaki lima tersebut.

II. METODE PENELITIAN

A. Wilayah Studi

Lokasi studi adalah koridor inspeksi Banjir Kanal Timur Kecamatan Duren Sawit, DKI Jakarta sebagai kawasan aktivitas perdagangan UMKM (**lihat Gambar 1**). Secara mikro, jalur BKT yang membentang panjang terdiri dari dua jalur yakni jalur khusus sepeda dan jalur inspeksi BKT. Batasan cakupan lingkup penelitian ini yakni jalur yang ada diantara jembatan Jalan Sawah Barat Dalam I hingga jembatan Jalan Pahlawan Revolusi.



Gambar 1. Peta lokasi penelitian terletak di Jalan Banjir Kanal Timur merupakan kawasan aktivitas perdagangan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini mengamati sekelompok manusia yakni terhadap aktivitas UMKM kaki lima, serta objek, dan kondisi dari kawasan sekitar Banjir Kanal Timur. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pendekatan studi secara deduktif. Pendekatan deduktif yang dimaksud pada penelitian ini mengenai “Pola Pemanfaatan Ruang Usaha dari UMKM kaki lima” menggunakan metode deduktif kuantitatif. Penggunaan metode ini akan sejalan dengan proses pengumpulan data pada pendekatan kuantitatif yakni dengan observasi serta penelitian dijabarkan dengan teknik analisis berupa distribusi frekuensi. Dalam menganalisis pola perilaku pemanfaatan ruang usaha yang dilakukan oleh UMKM yang beraktivitas dan berdagang di Jalan Inspeksi Banjir Kanal Timur dilakukan dengan bantuan alat analisis distribusi frekuensi untuk menunjukkan besarnya frekuensi masing-masing variabel seperti, analisis pemanfaatan ruang usaha dilakukan dengan dukungan data hasil pengamatan seperti sarana fisik berdagang, jenis dagangan, pola penyebaran, serta pola pelayanan, dan gangguan-gangguan yang diberikan.

Metode analisis yang dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan analisis deskriptif serta metode kuantitatif. Adapun analisis deskriptif dilakukan dengan membuat deskripsi, gambaran faktual sesuai dengan kondisi dan fakta yang ditemukan secara langsung di lapangan. Mengutip pada Moh. Nazir dalam [17] bahwa penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif yakni untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

C. Cara Pengumpulan Data

Data diperoleh dengan melakukan kegiatan survei primer yaitu observasi dan dokumentasi yang dikombinasi dengan interview mendalam terhadap organisasi pengelola dan pelaku UMKM kaki lima. Kegiatan observasi dilakukan menyeluruh sesuai dengan variabel karakteristik UMKM, pola pemanfaatan ruang, hingga pola gangguan. Penentuan variabel yang akan diteliti berasal dari kajian pustaka. Identifikasi dilakukan dengan observasi mendalam secara langsung pada lokasi studi di waktu sore dan malam hari, karena malam hari merupakan waktu beroperasinya para pedagang di BKT tersebut. Kegiatan dokumentasi sebagai pendukung data/informasi visual dilakukan untuk mendapatkan bukti otentik berupa gambaran kondisi saat ini dari koridor Jalan Inspeksi Banjir Kanal Timur. Sementara *interview* singkat sebagai pelengkap informasi yang lebih rinci seperti *interview* dengan pelaku UMKM kaki lima dan melakukan *interview* dengan paguyuban pedagang kaki lima BKT bernama kaliber.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

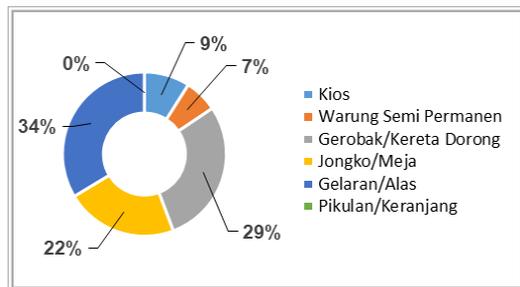
A. Karakteristik Aktivitas UMKM Kaki Lima

Aktivitas UMKM kaki lima merepresentasikan pola perilaku pemanfaatan ruang usaha yang dilakukan oleh pedagang. Karakteristik aktivitas UMKM kaki lima dapat

dilihat dari sarana yang digunakan dalam berdagang, jenis barang dagangan, pola penyebaran dan pola pelayanannya:

1. Sarana Fisik Berdagang

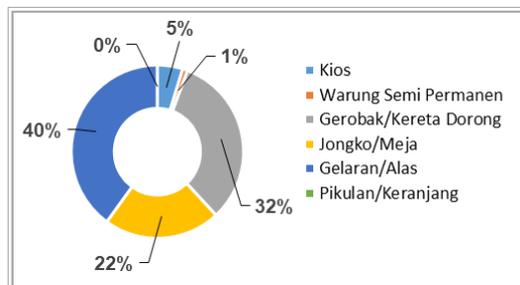
Penggunaan sarana berdagang pada masing-masing koridor memiliki karakteristik yang berbeda, seperti pada koridor Pondok Bambu 1 sarana yang banyak digunakan oleh pedagang adalah sarana gelaran/alas dan gerobak masing-masing sebanyak 34% dan 29% pedagang yg menggunakannya (**lihat Gambar 2**). Pedagang yang menggunakan sarana dengan cara menjajakan barang dagangannya di atas gelaran/alas, didominasi oleh pedagang aksesoris dan pakaian. Sementara, pedagang yang menggunakan gerobak umumnya adalah penjual makanan. Mereka para penjual makanan, banyak yang menempati jalur inspeksi yang posisinya dekat dengan kanal.



Gambar 2. Persentase jumlah sarana berdagang di Koridor Pondok Bambu 1

Sama halnya dengan pedagang yang menempati lokasi di koridor Pondok Bambu 1, koridor Pondok Bambu 2 banyak pedagang yang menggunakan sarana gelaran/alas serta gerobak. Sebanyak 40% pedagang dengan sarana gelaran/alas dan 32% pedagang yang menggunakan gerobak baik itu gerobak dorong maupun gerobak motor (**lihat Gambar 3**). Dapat dikatakan pada Koridor Inspeksi BKT yang menjadi wilayah studi, banyak ditemui UMKM kaki lima yang berjualan pakaian/fashion busana dan aksesorisnya seperti topi, tas, gesper.

Sesuai kondisi dilapangan memang banyak pedagang pada kedua koridor menempati Jalur Inspeksi BKT yang memiliki lebar tiga meter yakni pada sisi yang menjauhi kanal. Selain sarana gelaran/alas dan gerobak jenis sarana dagang lainnya adalah pikulan/keranjang, pada kedua koridor tidak ditemukan pedagang yang menggunakan sarana pikulan/keranjang.



Gambar 3. Persentase jumlah sarana berdagang di Koridor Pondok Bambu 2

Persentase yang menunjukkan banyaknya sarana yang digunakan oleh pelaku UMKM kaki lima dapat dilihat pada **Gambar 1** dan **Gambar 2**. Pada masing-masing koridor terdapat pedagang yang menggunakan sarana kios sebanyak 9% di koridor Pondok Bambu 1 dan terdapat 5% pada koridor

Pondok Bambu 2. Kios-kios ini berdiri dengan bangunan yang terbuat dari papan, sifatnya menetap yaitu tergolong menetap secara temporer [13]. Jadi jika sewaktu-waktu dilakukan penataan kios ini akan ikut dibersihkan karena mereka berdiri di atas tanah negara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima Kaliber (Kaki Lima Bersatu) diperoleh informasi bahwa ada di antara para pedagang yang melakukan penyewaan lahan, dan ada juga yang tidak menyewa. Para pedagang yang menggunakan sarana kios-kios temporer adalah salah satu yang menyewa. Namun di Kaliber sendiri tidak ada pedagang yang membayar sewa sepeser pun kepada paguyuban, karena paguyuban ini hanya berfungsi untuk mengorganisir dengan mempersatukan para pedagang kaki lima yang ada di BKT.

Sementara itu, untuk pedagang dengan sarana berdagang warung semi permanen pada K. Pondok Bambu 1 jumlahnya adalah 7%. Sedangkan koridor lain hanya ada satu pedagang yakni di koridor Pondok Bambu 2, atau sebesar 1%, yang merupakan pedagang Sate Madura terdiri dari gerobak serta meja dan kursi yang disediakan untuk kostumer. Pedagang yang menggunakan sarana jongko/meja sebanyak 22% di Koridor Pondok Bambu 1 dan Koridor Pondok Bambu 2 persentase tersebut dapat menunjukkan semua pedagang yang menggunakan sarana jongko/meja merupakan pedagang semi menetap. Hal tersebut dikarenakan peraturan yang ada hanya mengizinkan berjualan pada jam-jam tertentu. Penjelasan sebelumnya juga dilengkapi dengan peta komik mengenai ilustrasi jenis sarana fisik berdagang yang digunakan oleh pelaku UMKM kaki lima (**lihat Gambar 4**).

2. Jenis Dagangan

UMKM kaki lima pada Koridor Inspeksi BKT jenisnya sangat beragam sehingga mempengaruhi karakteristiknya. Karakteristik dari UMKM kaki lima berdasarkan jenis dagangannya di Koridor Inspeksi BKT dibagi menjadi tiga jenis, yaitu pedagang makanan dan minuman, pedagang non-makanan, dan penjual jasa.

Tabel 1. Jumlah UMKM kaki lima berdasarkan jenis makanan dan minuman

No	Koridor	Makanan/Minuman		
		Makanan Mentah/Setengah Jadi	Siap saji	
			Dine in	Take Away
1	Pondok Bambu 1	1	22	33
2	Pondok Bambu 2	1	10	28
f		2	32	61
%		1%	14%	27%

Pada kelompok pedagang makanan dan minuman (**lihat Tabel 1**), UMKM kaki lima yang ada menjual makanan, termasuk bahan makanan mentah seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Selain itu juga terdapat pedagang makanan/minuman siap saji baik yang berupa jajanan maupun kuliner yang dapat makan di tempat, serta untuk dibawa pulang. Pada kedua kategori terakhir, para pedagang menyediakan fasilitas makan lesehan dan non-lesehan dengan fasilitas meja dan kursi yang dapat digunakan oleh pelanggannya.



Gambar 4. Jenis sarana fisik berdagang yang digunakan pedagang UMKM kaki lima di BKT

Tabel 2. Jumlah UMKM kaki lima berdasarkan jenis non makanan

No	Koridor	Non Makanan										
		Kebutuhan sehari-hari		Trend dan Fashion		Otomotif				Campuran		
		A*	B*	C*	D*	E*	F*	G*	H*	I*	J*	K*
1	Pondok Bambu 1	3	2	13	27	6	0	0	1	1	3	1
2	Pondok Bambu 2	5	2	15	29	3	1	1	2	1	5	0
	f	8	4	28	56	9	1	1	3	2	8	1
	%	4	2	12	25	4	0	0	1	1	4	0

Keterangan:

- A* – Barang Rumah Tangga
- B* – Barang Elektronik
- C* – Aksesoris Fashion
- D* – Pakaian
- E* – Sandal/sepatu
- F* – Aksesoris Otomotif

- G* – Helm
- H* – Vape
- I* – Mainan Anak
- J* – Aksesoris HP
- K* – Batu Nisan

Pada kelompok pedagang non-makanan (lihat Tabel 2), jenis barang dagangan yang dijual sangat beragam, seperti barang-barang kebutuhan sehari-hari; fashion; perlengkapan otomotif; dan jenis campuran seperti vape, mainan anak-anak, aksesoris HP, dan lain-lain. Lokasi kelompok pedagang ini tersebar di sepanjang Saluran Banjir Kanal Timur.

Tabel 3. Jumlah UMKM kaki lima berdasarkan jenis jasa

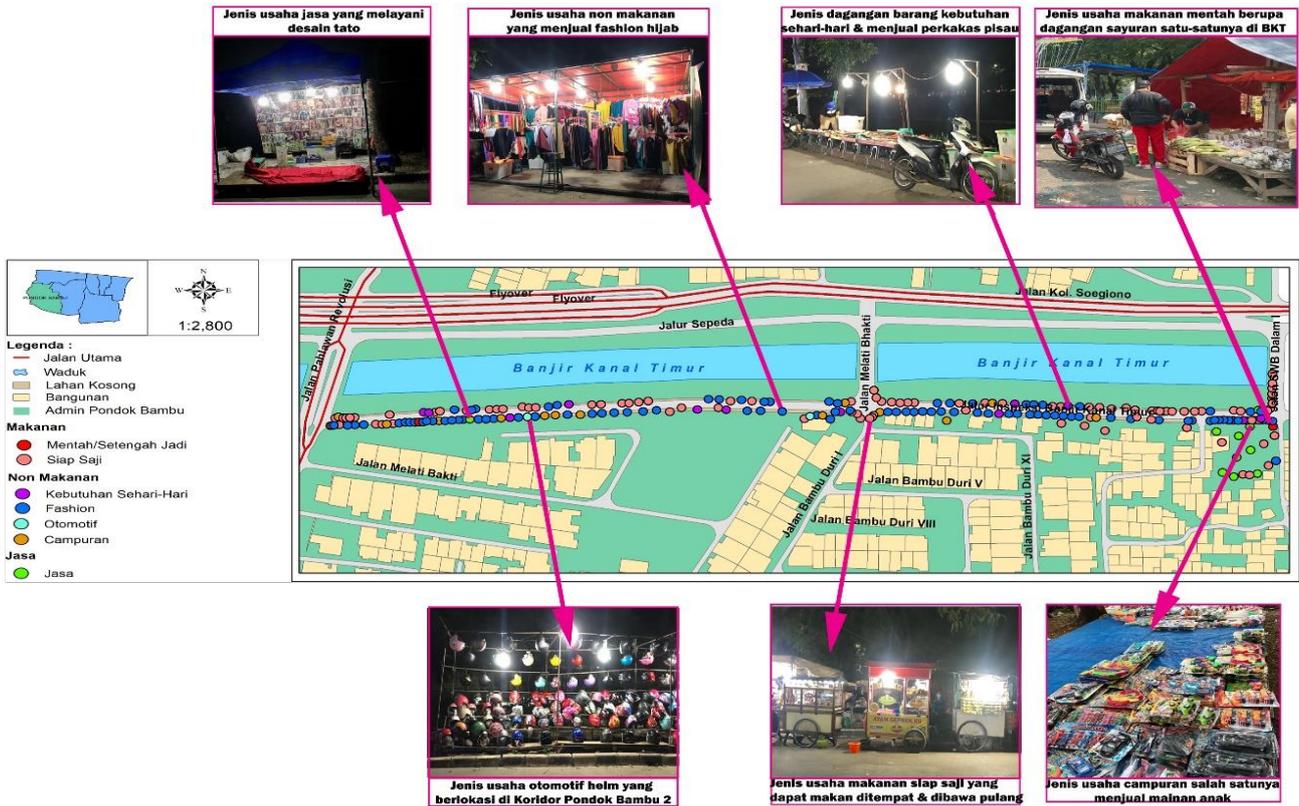
No	Koridor	Jasa	
		Tato	Sarana Wisata
1	Pondok Bambu 1	0	9
2	Pondok Bambu 2	1	1
	f	1	10
	%	0%	4%

Sementara itu, kelompok penjual jasa (lihat Tabel 3), memberikan pelayanan yang dapat dinikmati oleh pelanggan secara langsung di tempat seperti jasa pembuatan desain tato serta jasa hiburan. Jasa hiburan yang ada berupa sarana wisata yang dikelola oleh perorangan dengan menyediakan wahana bermain anak seperti wahana pontang-panting, bianglala, mandi bola, komidi putar, dll. Jasa hiburan ini sangat diminati oleh anak-anak dan ditemani orangtua yang mana dapat menjadi hiburan murah. Tarif harga setiap wahana juga terjangkau dan suasana di kawasan dibuat *colorfull* sehingga dapat menjadi sebuah daya tarik.

Jadi, jenis barang dagangan yang digeluti oleh pelaku UMKM kaki lima didominasi oleh pedagang makanan dan minuman sebesar 42%. Jalur Inspeksi BKT yang merupakan ruang terbuka publik lokasinya terbilang strategis karena sering dilalui oleh masyarakat sekitar. Ditambah lagi terdapat aktivitas yang dilakukan oleh sektor informal menjual berbagai produk makanan, sandang, dan lain-lain. Barang dan jasa yang ditawarkan memiliki harga yang terjangkau sehingga dapat menjadi tempat hiburan murah.

Pada kategori dagangan berjenis makanan setengah jadi terdapat penjual sayuran satu satunya di kawasan Banjir Kanal Timur dan pedagang buah-buahan. Sedangkan makanan siap saji lebih banyak pedagang makanan yang menjual makanan yang langsung dibawa pulang sebesar 27%. Beberapa pedagang makanan siap saji (14%) menyediakan fasilitas lesehan, meja, kursi bagi kostumer yang ingin makan di tempat seperti warung sate, warung nasi, bakso mie ayam, dan warung seafood. Selain itu jenis dagangan berupa pakaian menunjukkan jenis yang banyak ditemukan di Jalur Inspeksi BKT dengan persentase sebesar 25% pedagang pakaian. Sementara itu, jenis dagangan berupa jasa terdapat pedagang tato serta wahana bermain anak berjumlah 4% dari total pedagang yang ada di Koridor Inspeksi BKT Pondok Bambu. Jenis dagangan secara jelas dapat dilihat pada Gambar 5.

dorong, gerobak motor, meja/jongko dengan tenda. Mereka



Gambar 5. Jenis dagangan yang terdapat di Kawasan Banjir Kanal Timur



Gambar 6. Sebaran aktivitas pedagang UMKM kaki lima berdasarkan sarana dagang

3. Pola Penyebaran

Pola penyebaran UMKM kaki lima di sepanjang Jalur Inspeksi Banjir Kanal Timur memiliki pola penyebarannya memanjang. Jalur inspeksi yang membentang memanjang terbagi atas koridor-koridor dan saling dihubungkan dengan jembatan. Memiliki aksesibilitas yang tinggi serta pencapaian yang sangat mudah menjadikan sepanjang jalur ini dipenuhi dengan pedagang UMKM kaki lima. Hal tersebut sesuai dengan padatnya aktivitas, terutama pada Koridor Jalan Inspeksi Pondok Bambu 2 yang menghubungkan kawasan permukiman dengan kawasan perdagangan dan jasa yang ada di Jl. Pahlawan Revolusi.

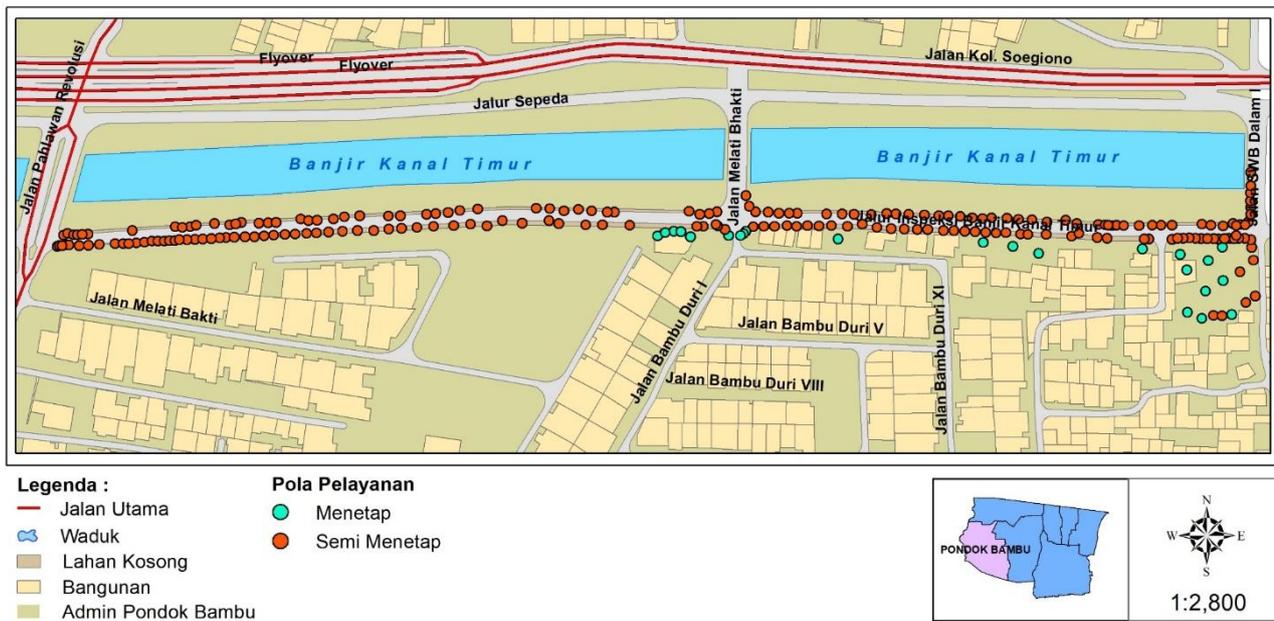
Pola penyebaran UMKM kaki lima jenis makanan/minuman tersebar memanjang di sisi utara jalur inspeksi. Pada sisi utara umumnya dapat ditemui pedagang yang menjual makanan/minuman dengan menggunakan gerobak

termasuk dalam pedagang yang tidak terorganisir sehingga saat waktu berjualan selesai di sisi utara jalur inspeksi ini selalu dikosongkan. Sementara pada sisi selatan jalur inspeksi dominan pedagang non makanan. Secara lebih jelas pola persebaran dituangkan dalam peta seperti pada **Gambar 6**.

Pola penyebaran memanjang/ *linear concentration* mendukung para pedagang yang berjualan di kawasan BKT untuk saling beraglomerasi pada suatu lokasi yang dianggap ramai. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Paguyuban Kaliber atau Kaki Lima Bersatu bahwa:

“Kebersamaan para pedagang yang tergabung dalam paguyuban ini dapat menciptakan kerukunan antar pedagang, dibuktikan dengan para pedagang saling mengkomunikasikan kondisi lokasi masing-masing (ramai/tidaknya) bahkan rela tukeran tempat untuk menghindari kesenjangan antar pedagang”.

Seperti dalam teori dari Mc Gee dan Yeung [13] para pelaku UMKM kaki lima saling mendukung satu sama lain dengan melakukan kerjasama antar pedagang.



Gambar 7. Pola pelayanan UMKM kaki lima di Kawasan Banjir Kanal Timur

Dengan pola penyebaran memanjang dan juga beraglomerasi seperti ini, para pedagang dapat saling mendukung dan membantu, terutama pedagang yang menggunakan sarana gerobak. Penyebaran para pedagang dengan gerobak ini berkumpul atau beraglomerasi di kawasan pintu-pintu masuk koridor. Hal itu dikarenakan koridor BKT memiliki pencapaian yang mudah dari berbagai arah mulai dari arah utara, timur, selatan, dan barat. Arah utara pencapaian dapat melalui Jl. Kolonel Soegiono dan kemudian menuju Jl. Melati Bhakti atau Jl. SWB Dalam I. Jika dari arah timur adalah dengan langsung melalui Jalur Inspeksi Banjir Kanal Timur. Sementara dari arah permukiman warga atau dari arah selatan dengan melalu Jl. Bambu Duri atau Jl. SWB Dalam I. Arah barat pencapaian dilakukan dengan melewati Jl. Pahlawan Revolusi (lihat Gambar 6).

4. Pola Pelayanan

Setelah dilakukan observasi lapangan, kegiatan UMKM kaki lima yang memadati Jalur Inspeksi Banjir Kanal Timur terbagi menjadi dua pola pelayanan yaitu menetap dan semi menetap. Banyaknya jumlah pelaku UMKM kaki lima sejumlah 227 pedagang ternyata dapat menciptakan keberagaman pelayanan. Dalam melayani konsumennya pedagang UMKM kaki lima setiap unitnya menggunakan sarana fisik yang beragam. Pola pelayanan yang ada di Jalur Inspeksi BKT Pondok Bambu didasarkan pada sarana fisik yang digunakan. Pedagang dengan menggunakan kios, lahan sewa, warung semi permanen dikategorikan sebagai pedagang yang menetap meskipun temporer. Sementara pedagang yang hanya membuka lapak di titik-titik tertentu dan membongkar lapaknya jika waktu berdagang selesai disebut pedagang semi menetap yang mana biasanya menggunakan sarana gerobak, kereta dorong, jongko/meja, gelaran/alas.

Seperti yang dapat dilihat pada Tabel 4, sifat layanan para pelaku UMKM kaki lima sebanyak 10% adalah pedagang menetap. Temuan studi di lapangan pedagang yang menetap

menggunakan sarana berupa kios dan sarana warung semi permanen. Namun, ada juga pedagang yang menggunakan sarana warung semi permanen yakni terdapat dua pedagang itu memiliki pola pelayanan semi menetap. Hal tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh tempat berdagang, dimana dua pedagang tersebut menempati lahan kosong di sebelah utara Jalur Inspeksi BKT. Sebagai informasi tambahan bahwasanya lahan kosong yang ada pada sisi utara Jalur Inspeksi BKT tersebut pedagang wajib membongkar sarananya. Dapat diketahui juga kondisi Jalur Inspeksi BKT pada siang hari, kondisinya bersih dari sarana/lapak pedagang atau dapat dikatakan selalu dikosongkan.

Tabel 4.
Pola Pelayanan Pelaku UMKM Kaki Lima

No	Pola Pelayanan	Sarana	f	Σ	%
1	Menetap	Kios	16	23	10%
		Warung Semi Permanen	7		
		Warung Semi Permanen	2		
2	Semi Menetap	Gerobak/Kereta Dorong	69	204	90%
		Jongko/Meja	50		
		Gelaran/Alas	83		
3	Keliling	Pikulan/Keranjang	0	0	0%
Total			227	227	100%

Sementara itu, sebanyak 90% pedagang memiliki pola pelayanan semi menetap, meskipun menggunakan sarana dagang berupa gerobak pedagang ini sudah memiliki lokasi tetap yang terbatas yakni dibatasi oleh waktu. Sementara itu, tidak ditemukan pedagang yang keliling (*mobile hawkers*). Hal ini dikarenakan pedagang tersebut bisa memanfaatkan lahan kosong yang ada di BKT sebagai tempat untuk berjualan. Dapat dikatakan pola pelayanan yang ada adalah pembeli menjemput pedagang untuk membeli sesuatu yang diperlukan sehingga jarang ada pedagang keliling. Para pedagang dalam melayani pembeli dengan memposisikan

lapak selaras dengan garis pembatas jalan. Cara pedagang men-*display* barang dagangannya sangat memudahkan konsumen untuk memilih dan mencari kebutuhannya. Posisi lapak pedagang saling berhadapan antara pedagang yang menempati tepi sungai dan pedagang yang berada berseberangan dengan sungai. Pola pelayanan yang dilakukan UMKM kaki lima di BKT dapat dilihat pada **Gambar 7.**

B. Pola Pemanfaatan Ruang BKT Oleh Aktivitas UMKM Kaki Lima

Pola pemanfaatan ruang adalah proses, cara, dan perbuatan untuk menggunakan area tertentu dalam suatu bentuk (struktur) yang tetap atau berulang sehingga dapat dilihat pola pemanfaatannya [6]. Hingga saat ini Koridor Jalan Inspeksi BKT memiliki pemanfaatan lain oleh sektor informal yaitu menjadi tempat yang megakomodasikan kepentingannya untuk mencari penghasilan. Berdasarkan pengelolaan aktivitas UMKM kaki lima menurut Mc Gee dan Yeung [13] ruang Koridor Inspeksi BKT termasuk kedalam peruntukkan ruang terbuka/open market. Artinya aktivitas UMKM kaki lima yang terdapat di koridor inspeksi juga merupakan suatu bentuk nyata dari teori tersebut yakni, pengelolaan/ penataan fisik lokasi PKL dengan menyediakan ruang untuk sektor informal.



(a) (b)
Gambar 8. Pemanfaatan ruang BKT oleh UMKM kaki lima, waktu sore hari (a) dan waktu malam hari (b)

Pola pemanfaatan ruang usaha yang terjadi pada ruang Koridor Inspeksi BKT adalah koridor inspeksi merupakan ruang terbuka yang dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM kaki lima sebagai pasar terbuka (*open market*), dengan waktu aktivitas antara pukul 17.00 – 23.00, sehingga disebut sebagai *night market*. Kawasan ini merupakan kawasan tepian sungai, sebagai suatu koridor sepanjang aliran sungai (kanal) yang dapat diakses oleh masyarakat setiap saat tanpa batasan waktu (terbuka setiap hari).

Pemanfaatan ruang BKT oleh pedagang dilakukan dengan sistem bongkar pasang pada sarana yang digunakan (sistem *pop up*), dengan memanfaatkan lahan kosong sebagai tempat dagang pada tepian jalur inspeksi yakni pada lahan sisi selatan jalur inspeksi memiliki lebar tiga meter dan sisi utara lebarnya hanya dua meter, serta memanfaatkan badan jalan yang ada untuk berdagang dan tempat parkir pengunjung. Sesuai dengan pemanfaatan ruang BKT dengan sistem *pop up* maka rata-rata sarana berdagang yang digunakan oleh pelaku UMKM kaki (**lihat Tabel 5**).

Elemen fasilitas yang digunakan pedagang meliputi kios, warung semi permanen, gerobak, jongko/meja, dan gelaran/alas. Sebagian besar pedagang menggunakan sarana dagang berupa gelaran/alas, dengan rata-rata sebesar 41,5 pedagang menggunakan sarana tersebut. Hal ini menunjukkan kegiatan perdagangan dan jasa yang ada di kawasan BKT sangat mendukung dalam penerapan sistem

pop up atau bongkar pasang sarana. Sarana ini banyak dipilih oleh pedagang dengan jenis usaha non-makanan yakni UMKM kaki lima yang menjual barang fashion. Penggunaan sarana berjenis gelaran biasanya menempati lahan di sisi selatan sepanjang jalur inspeksi.

Tabel 5.
Rata-rata sarana penunjang UMKM kaki lima di BKT

No	Sarana	Jumlah		\bar{X}
		K. Pondok Bambu 1	K. Pondok Bambu 2	
1	Kios	11	5	8
2	Warung Semi Permanen	8	1	4,5
3	Gerobak/Kereta Dorong	35	34	34,5
4	Jongko/Meja	27	23	25
5	Gelaran/Alas	41	42	41,5
6	Pikulan/Keranjang	0	0	0
Total		122	105	

Selanjutnya, sarana gerobak menunjukkan rata-rata yang juga tergolong tinggi sebesar 34,5 pedagang. Sarana tersebut termasuk dalam sarana yang sederhana karena banyak dipilih pedagang yang memiliki jenis dagangan berupa makanan dan minuman. Para pedagang gerobakan dalam berjualan di Jalur Inspeksi BKT memanfaatkan badan jalan sehingga menyebabkan pengurangan lebar jalan semula lebar awal lima meter menjadi 3-4 meter. Hal tersebut menunjukkan bahwa masing-masing UMKM kaki lima memiliki pemanfaatan ruang yang berbeda.

Para pelaku UMKM kaki lima memanfaatkan Koridor Jalan Inspeksi BKT dilakukan dengan menggunakan fasilitas penunjang berupa listrik dan air. Untuk mendukung kegiatan berdagangnya itu para pedagang secara koordinir mengeluarkan biaya untuk kebutuhan listrik dan air. Listrik dan air didapatkan dengan biaya Rp5.000 per lampu dan Rp2.000 per ember. Kebutuhan fasilitas masing-masing pedagang tentunya berbeda dimana listrik tidak dibutuhkan oleh pedagang makanan dan minuman gerobakan yang siap saji dan *take away*.

Banyak di antara para pedagang makanan dan minuman yang untuk dibawa pulang (*take away*) hanya mengandalkan lampu penerangan yang tersedia di Jalan Inspeksi BKT. Sedangkan air untuk mencuci diperlukan oleh pedagang makanan siap saji yang menyediakan makan di tempat (*dine-in*). Penyedia listrik dan air untuk mencuci adalah warga sekitar yang tinggal dekat dengan kawasan Banjir Kanal Timur. Pedagang dalam menggunakan ruang sebagai tempat berdagang bertanggung jawab atas kebersihan jalur inspeksi. Hal tersebut dikatakan oleh Ibu Mis pedagang Sate Madura merupakan pedagang yang sudah sejak lama berjualan di Koridor Inspeksi BKT.

“Kita nempatin warung dari sore sampai malam, pas malem kita tutup. Setiap hari kita ada iuran buat bayar sampah Rp 5.000 itu juga perhari trus kalo butuh air seembernya Rp 2.000. Ini lampu juga kan bayarnya Rp5.000, saya pake dua lampu jadi Rp10.000 ya lumayan juga Mbak.”

Observasi lapangan yang dilakukan di siang hari memperlihatkan bahwa kondisi lapangan di Kawasan Jalan Inspeksi BKT ini memiliki kondisi yang bersih. Pedagang mengumpulkan sampah-sampah pada tempat sampah yang

telah disediakan secara mandiri oleh Paguyuban Pedagang BKT 40. Artinya kebutuhan fasilitas pedagang setiap harinya mulai dari air, listrik, dan sampah sudah terpenuhi, baik dengan cara memanfaatkan fasilitas yang ada pada ruang BKT maupun dengan menyelenggarakan fasilitas tambahan lainnya dengan biaya yang ditanggung masing-masing pedagang yang mempergunakannya. Bentuk pola pemanfaatan ruang inspeksi BKT oleh UMKM kaki lima berdasarkan sarana yang digunakan di setiap koridor dapat dilihat pada **Gambar 9** dan **Gambar 10**.

C. Pola Gangguan

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) menjelaskan kata ‘gangguan’ memiliki arti sebagai suatu hal yang dapat menyebabkan ketidaklancaran. Dalam konteks ini, salah satu gangguan adalah gangguan yang disebabkan oleh aktivitas UMKM kaki lima dalam pemanfaatan ruang Koridor Jalan Inspeksi BKT tersebut. Namun, Undang-undang no.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanahkan di dalam pasal 28 tentang rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana, dimana salah satunya adalah bagi kegiatan sektor informal. Amanah tersebut ditegaskan juga di dalam RTRW DKI Jakarta 2030 pada pasal 78, disebutkan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya yakni kawasan peruntukkan sektor informal.

Tabel 6.
Pola gangguan yang ditimbulkan dari aktivitas UMKM kaki lima

No	Gangguan		K. Pondok Bambu 1	K. Pondok Bambu 2
	Pola	Waktu		
1	Terkerumunnya aktivitas pedagang memadati ujung koridor dengan sarana gerobak dan gelaran	Malam hari	--	v
2	Adanya pedagang yang berjualan di pintu koridor	Sore dan Malam hari	v	--
3	Aktivitas pada koridor penuh dengan kendaraan pedagang dan pengunjung yang parkir	Sore dan malam hari	v	v
4	Gangguan visual karena sampah berserakan	--	--	--
5	Potensi konflik kepentingan oleh aktivitas informal	Malam hari	v	v

Perda DKI Jakarta nomor 1 tahun 2012 pada bagian pola ruang Kota Jakarta Timur, juga mengatakan bahwa Koridor Jalan BKT memiliki peruntukkan sebagai kawasan hijau budidaya, dengan merumuskan bahwa kawasan Banjir Kanal Timur (BKT) direncanakan sebagai kawasan strategis lingkungan, yang memiliki fungsi utama sebagai prasarana pengendali banjir, dengan pemanfaatan yang juga dapat dilakukan untuk kepentingan rekreasi, transportasi, penyediaan sumber air bersih, dan kegiatan ekonomi lainnya yang tidak mengganggu fungsi utama sebagai kawasan strategis lingkungan tadi.

Tabel 7.
Potensi dampak yang ditimbulkan dari aktivitas UMKM kaki lima berdasarkan gangguan yang timbul

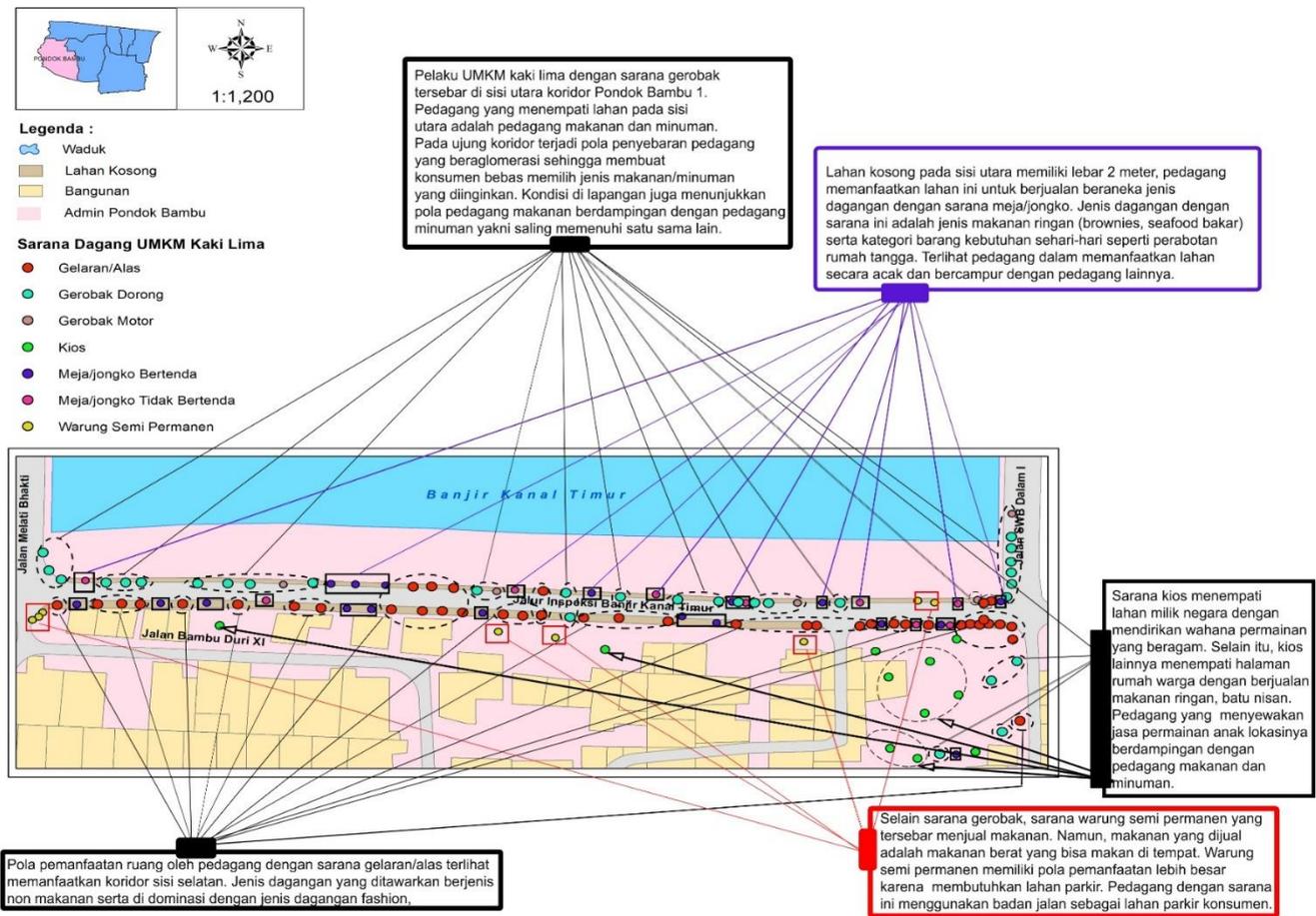
Dampak	
Potensi	Skala
Kemacetan yang mengganggu jalur transportasi utama, Penumpukkan kendaraan roda dua (Jl. Pahlawan Revolusi)	Lokal/ hanya di lokasi studi
Akses pintu keluar masuk ke kawasan yang penuh/sesak, Pencapaian menjadi sulit, Menimbulkan antrian kendaraan keluar masuk koridor (Jembatan Sawah Barat Dalam I)	Kecamatan
Penyempitan badan jalan, ruang gerak pengguna transportasi di jalur inspeksi terganggu	Lokal/ hanya di lokasi studi
Lingkungan kotor	--
Perselisihan	Kecamatan

Melalui kacamata kebijakan dan peraturan yang berlaku tersebut dilakukan analisis identifikasi gangguan yang dilakukan oleh pemanfaatan Koridor Jalan Inspeksi BKT oleh para pelaku UMKM kaki lima yang ada. Analisis pola gangguan dengan alat tabel ceklist untuk mengetahui potensi dampak yang ditimbulkan akibat aktivitas ekonomi informal pada kawasan BKT tersebut disajikan pada Tabel 6 dan 7, yang dijelaskan sebagai berikut:

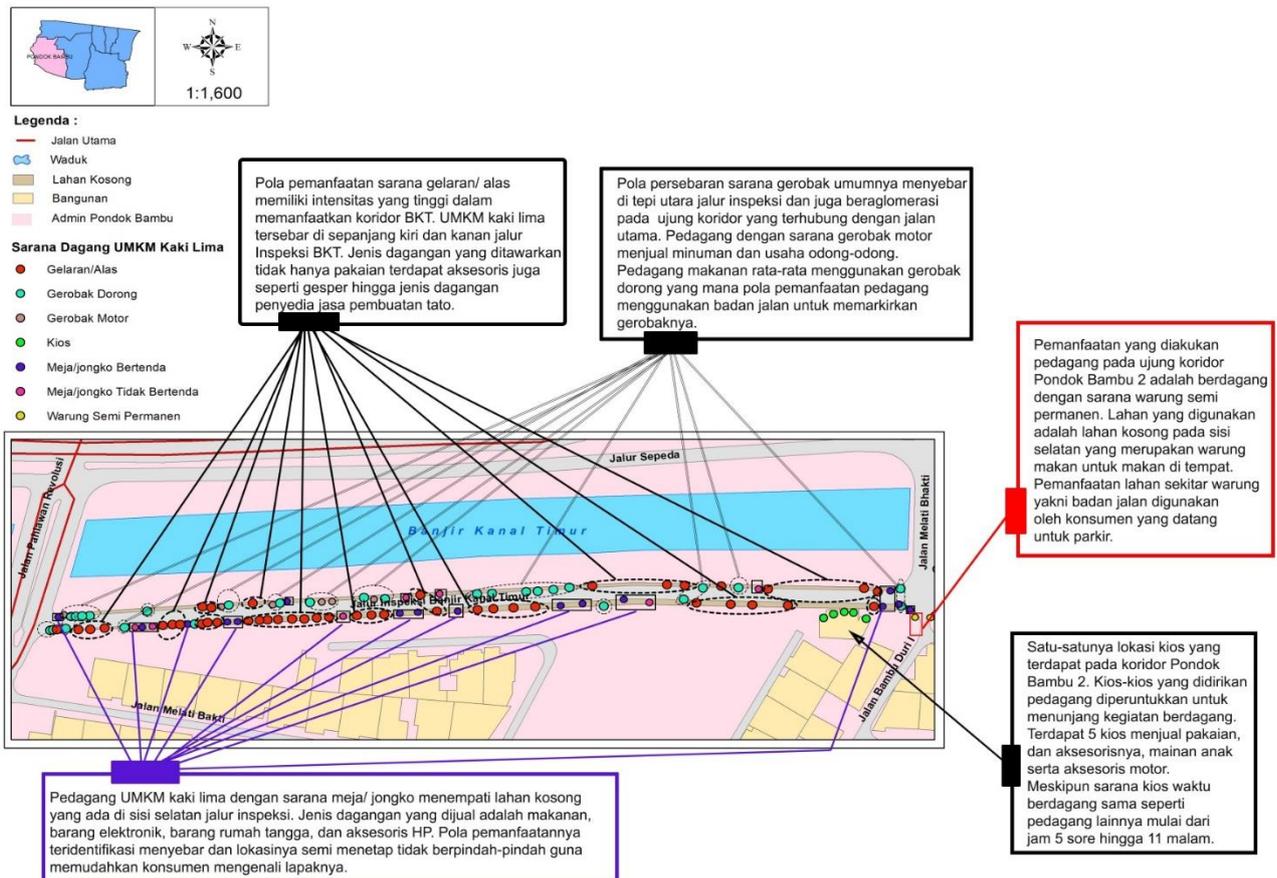
1. Terkerumunnya Aktivitas Pedagang Memadati Ujung Koridor dengan Sarana Gerobak dan Gelaran

Observasi yang dilakukan memperlihatkan bahwa Koridor Jalan Inspeksi BKT memiliki pemanfaatan seperti yang disebutkan dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2012 yakni juga dipergunakan untuk kegiatan ekonomi. Ditemukan banyak pelaku sektor informal yakni UMKM kaki lima menempati koridor BKT yang merupakan kawasan strategis lingkungan. Namun, kegiatan perdagangan yang mereka lakukan di sepanjang kiri dan kanan koridor BKT tidak sepenuhnya sesuai. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Pak Ruben ketua paguyuban Kaki Lima Bersatu:

“Para pedagang diizinkan untuk berjualan di sepanjang BKT adalah mereka yang menempati lapak di sebelah kiri (sisi selatan yang menjauhi kanal). Pedagang tersebut termasuk dalam pedagang yang terorganisir oleh Akamsi.”



Gambar 9. Pola pemanfaatan ruang usaha pada Koridor Pondok Bambu 1



Gambar 10. Pola pemanfaatan ruang usaha pada Koridor Pondok Bambu 2



Gambar 11. Kerumunan pedagang memadati Koridor Pondok Bambu 2

Kondisinya sekarang ini pedagang juga berjualan pada lapak juga ada di sisi kanan (sisi utara jalur inspeksi) yakni pedagang dengan sarana gerobak. Bukan hanya berjualan pada sisi utara BKT tapi juga banyak yang beraglomerasi di ujung koridor Pondok Bambu 2. Faktor utama terjadinya gangguan terkerumunnya pedagang di ujung koridor Pondok Bambu 2 adalah kestrategisan. Lokasi yang strategis dianggap dapat menarik minat pembeli karena mudah untuk ditemukan, sehingga memudahkan pembeli dalam melihat barang dagangannya. Sejumlah pedagang memadati ujung koridor Pondok Bambu 2 dengan menggunakan sarana gerobak dan gelaran. (lihat Gambar 11).

Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 12, keberadaan pedagang tersebut berdampak terjadinya penumpukkan kendaraan roda dua yang akan keluar-masuk melalui koridor Pondok Bambu 2. Dapat dikatakan adanya pedagang menempati lokasi tersebut dapat berpotensi mengganggu arus lalu lintas pada jalur transportasi utama. Sebab koridor Pondok Bambu 2 pada sisi barat merupakan titik temu kendaraan dari Jalur Inspeksi BKT dengan kendaraan dari jalan utama JL. Pahlawan Revolusi. Terlebih lagi pada jam sibuk banyak pengendara motor dan mobil yang melalui JL. Pahlawan Revolusi. Kondisi ini hanya terjadi pada malam hari saja karena saat aktivitas UMKM kaki lima berlangsung, portal yang ada pada koridor ini dibuka. Sementara pada saat pagi hingga siang hari lokasi ini ditutup dengan portal sehingga gangguan tidak terjadi sepanjang hari. Dampak yang terjadi memiliki skala lokal yakni hanya terjadi pada lokasi studi.



Gambar 12. Aktivitas lalu lintas pada jalan utama (Jl. Pahlawan Revolusi)

2. Adanya Pedagang yang Berjualan di Pintu Koridor

Aktivitas pedagang UMKM kaki lima dapat menyebabkan berkurangnya *space* bagi pengguna transportasi pada Koridor Inspeksi BKT. Terlebih lagi para pedagang berjualan pada pintu-pintu koridor. Gangguan berupa adanya pedagang yang berjualan di pintu-pintu koridor dapat ditemukan pada sore dan malam hari. Hal tersebut dapat berdampak terhadap akses pintu keluar masuk



(a)
Gambar 13. Kondisi pintu koridor BKT, kondisi dari dalam (a) dan kondisi dari luar (b)

Koridor Inspeksi BKT yang menjadi penuh dan sesak. Terutama bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan dari koridor satu ke koridor sebelahnya. Artinya gangguan jenis ini dapat berpengaruh terhadap akses pintu masuk di koridor lainnya. Kondisinya jalur inspeksi yang ada memiliki jalur 2 arah atau dapat dikatakan 2/2 UD. Selain itu, koridor Pondok Bambu 1 terhubung langsung dengan koridor di Kelurahan Duren Sawit. Selain itu, memiliki dampak dalam hal pencapaian, semula memiliki pencapaian yang mudah dapat dilalui dari berbagai arah tetapi malah membuat pencapaian ke kawasan menjadi sulit. Dimana pencapaian ke lokasi studi dari arah timur terganggu. Sehingga skala terjadinya dampak pencapaian yang sulit dapat merembet terhadap lokasi koridor lainnya karena setiap koridor memiliki pintu koridor masing-masing yang saling terhubung. Dampak lainnya terjadi pada Jembatan SWB Dalam I menimbulkan antrian kendaraan yang akan keluar masuk koridor. Gangguan yang terjadi pada Koridor Pondok Bambu 1 tampak pada Gambar 13.

3. Aktivitas pada Koridor Penuh dengan Kendaraan Pedagang dan Pengunjung yang Parkir

Aktivitas UMKM kaki lima yang ada di kawasan BKT pola penyebarannya memanjang dan tidak memiliki lahan parkir untuk pengunjung. Kondisi yang ada menyebabkan pengunjung kawasan BKT yang memarkirkan kendaraannya pada sisi jalan. Hal yang sama juga dilakukan oleh pedagang yang memadati lokasi yakni pada sore hari dan malam hari untuk membuka lapak dan menutup lapak. Gangguan tersebut disebabkan motor, mobil, dan gerobak dorong yang digunakan pedagang untuk membawa barang dagangan hingga kendaraan milik pedagang parkir di tepi Jalur Inspeksi BKT. Artinya aktivitas pengunjung pasar malam dan pedagang di jalur inspeksi dapat menyebabkan penyempitan badan jalan dan kelancaran transportasi terganggu (lihat Gambar 14).



Gambar 14. Aktivitas di koridor yang penuh



Gambar 15. Kendaraan bermotor yang parkir

Gambar 15 memperlihatkan kondisi koridor yang penuh karena kendaraan pedagang yang parkir pada sisi kiri yakni kereta dorong. Sementara pada Gambar 15 banyak kendaraan pengunjung yang parkir. Sehingga berdampak terhadap ruang gerak pengguna transportasi terganggu dan badan jalan menjadi sempit. Kendaraan yang parkir dapat menyebabkan pengurangan lebar jalan semula lebar awal 5 m menjadi 3-4 m. Dimana pada saat malam hari yakni waktu mulai beraktivitas pedagang UMKM kaki lima pengendara mobil tidak dapat melewati jalur inspeksi. Jadi pengguna Jalur Inspeksi BKT pada malam hari serta pengunjung yang datang umumnya memadati lokasi dengan menggunakan sepeda motor. Baik itu pengunjung yang hanya berhenti sebentar hingga mendapatkan barang yang diinginkan ataupun pengunjung yang berhenti dalam waktu yang lebih lama seperti untuk makan ditempat, bersantai bersama keluarga, atau nongkrong. Dampak yang terjadi adalah skala lokal/hanya di lokasi studi.

4. Lingkungan Kotor

Seperti yang dapat dilihat pada **Tabel 6**, gangguan akibat adanya sektor informal pada kawasan BKT. Permasalahan mengenai sampah berserakan sehingga menyebabkan lingkungan yang kotor tidak ditemukan baik di Koridor Inspeksi BKT 1 dan Koridor Inspeksi BKT 2. Padahal berdasarkan penelitian terdahulu disebutkan adanya aktivitas UMKM kaki lima dapat berpotensi terhadap lingkungan yang kotor dari sampah plastik berserakan hingga kenyamanan lingkungan. Pada wilayah Banjir Kanal Timur sudah dilengkapi dengan *street furniture* berjumlah tiga sampai empat signage. Berisikan himbauan larangan membuang sampah sehingga lingkungan tetap bersih. Terlebih lagi kesadaran dari para pedagangnya sendiri yang menjaga kawasan BKT Pondok Bambu. Pemanfaatan ruang BKT oleh pedagang dilakukan dengan kooperatif yakni menjaga kebersihan lingkungan pada kawasan yang dijadikan tempat berdagang. Hal tersebut dibuktikan dengan kepedulian dalam hal lingkungan, paguyuban pedagang membuat tong sampah permanen yang diletakkan di sisi kanal. Selain itu, pedagang di BKT secara terakomodir setiap harinya membayar biaya sebesar Rp 5.000 untuk biaya petugas pengangkut sampah.



(a)



(b)

Gambar 16. *Street furniture* yang ada di BKT, sampah dikumpulkan dan menunggu diangkut (a) dan *signage* pada salah satu koridor (b)

5. Potensi Konflik Kepentingan oleh aktivitas informal

Konflik kepentingan yang dimaksud adalah pertentangan persepsi mengenai pemanfaatan ruang publik oleh UMKM kaki lima. Seharusnya ruang publik mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat yang bersifat publik namun memiliki pemanfaatan lain dalam mengakomodasi kegiatan ekonomi yang bersifat privat. Kondisi awal pada sisi utara jalur inspeksi, lahan kosong yang ada di pagari dengan kawat berduri sebagai salah satu upaya membatasi penggunaan pada lahan tersebut. Namun kini kondisinya berbeda, pagar berduri menjadi hilang sehingga pedagang sudah bisa kembali menggunakan lahan kosong tersebut. Pedagang gerobakan dalam berjualan di Jalur Inspeksi BKT memanfaatkan lahan yang ada. Hal itu kerap kali kontra dengan satpol pp yang bertanggung jawab dengan ketertiban, Hal tersebut dapat terjadi karena perbedaan persepsi antara pedagang dan petugas satpol pp. Pihak satpol pp yang menggunakan perda DKI Jakarta mengenai Pelarangan Pemanfaatan Jalur Hijau. Sementara para pedagang melalui advokasi paguyuban menggunakan perda DKI Jakarta tentang Ketertiban Umum pasal 25 mengatur izin terkait wilayah untuk berdagang bagi pedagang kaki lima. Konflik yang terjadi mengakibatkan pengangkutan sarana-sarana yang digunakan oleh pedagang. Sarana milik pedagang yang diangkut adalah pedagang gerobakan (pedagang tidak terorganisir) yang dilarang berdagang pada sisi utara jalur inspeksi. Gambaran konflik yang terjadi di kawasan Banjir Kanal Timur Pondok Bambu (**lihat Gambar 17**).



(a)

(b)

Gambar 17. Konflik yang terjadi, pengangkutan gerobak pedagang oleh Satpol PP (a) dan seruan aksi pedagang di Kantor Walikota Jakarta Timur (b)

D. Sebaran Lokasi Gangguan

Sebaran lokasi tipologi gangguan yang terjadi di Koridor Inspeksi Banjir Kanal Timur yang terdiri atas empat jenis gangguan. Pola gangguan yang terdapat pada lokasi studi diantaranya adalah terkerumunnya aktivitas pedagang memadati ujung koridor dengan sarana gerobak dan gelaran, adanya pedagang yang berjualan di pintu koridor, aktivitas pada koridor penuh dengan kendaraan pedagang dan pengunjung yang parkir, dan potensi konflik kepentingan oleh aktivitas informal.

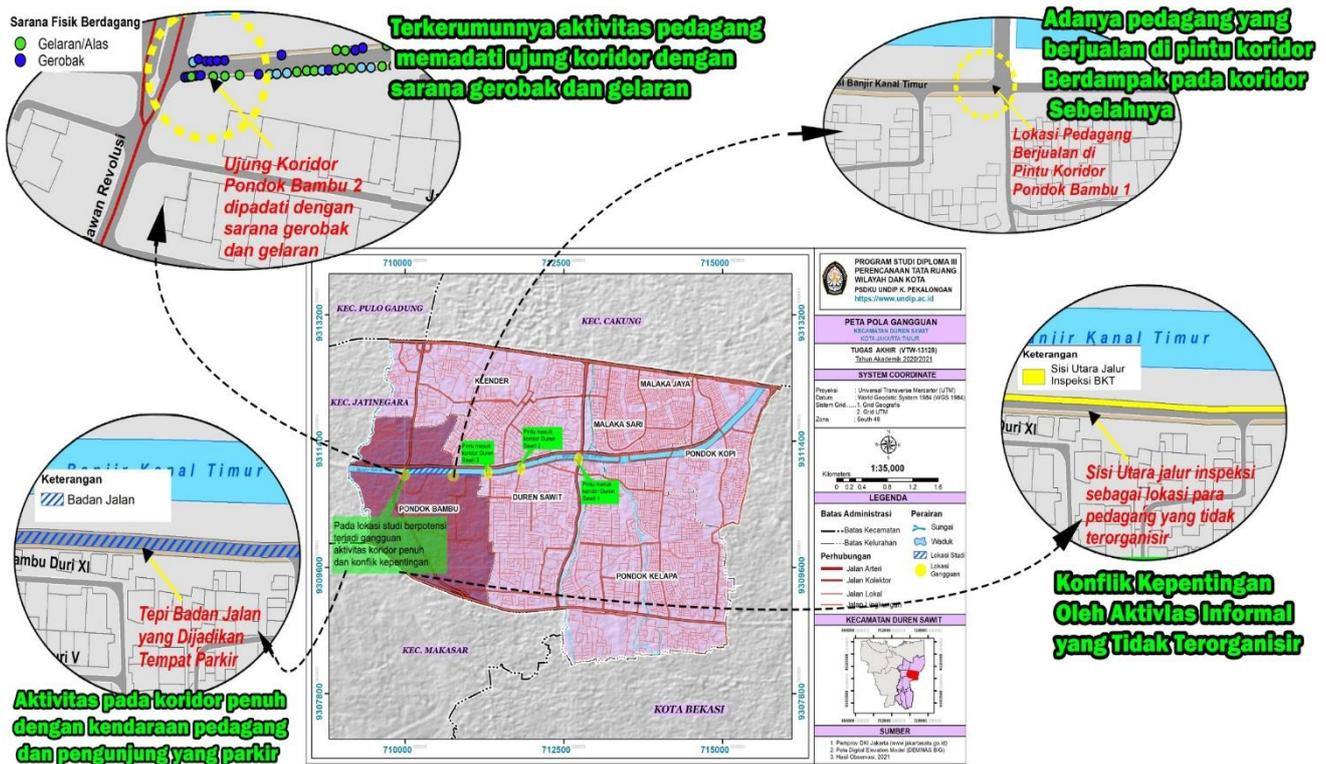
Pada **Gambar 18** dapat dilihat sebaran lokasi gangguan yang ditimbulkan dari adanya aktivitas UMKM kaki lima pada Koridor Pondok Bambu 2 terjadi gangguan berupa aktivitas pedagang yang berkerumun, sebagai akibatnya menimbulkan kemacetan. Disisi lain pada lokasi yang sama terjadi gangguan dari aktivitas pengunjung dan pedagang yang parkir hingga mengakibatkan penyempitan badan jalan. Sehingga pola lokasi gangguan yang terjadi pada koridor Pondok Bambu 2 dapat saling menguatkan. Dimana dapat menimbulkan kemacetan dan penyempitan badan jalan yang tersebar disepanjang jalur inspeksi.

Sementara, pada **Gambar 18** juga memperlihatkan Koridor Pondok Bambu 1 gangguan terjadi disebabkan adanya pedagang berjualan di pintu koridor serta gangguan

berupa badan jalan dijadikan tempat parkir dapat saling menguatkan. Seperti pada analisis pedagang berjualan di pintu masuk koridor, hal itu berdampak terhadap pencapaian sulit karena dapat merembet pada koridor lain yakni mempengaruhi koridor di Kelurahan Duren Sawit. Sementara itu, gangguan potensi konflik kepentingan pola lokasinya tersebar karena sektor informal yang tidak terorganisir memanfaatkan lahan sisi utara jalur inspeksi. Pola lokasi tersebar sehingga dapat menimbulkan penguatan dengan gangguan kerumunan sarana gerobak di ujung koridor Pondok Bambu 2.

jasa yang terdiri dari pedagang tato serta wahana bermain anak berjumlah 4%. Para pedagang tersebar memanjang mengikuti jalur sirkulasi yang ada serta pedagang-pedagang terorganisir (yang menempati lahan sisi selatan) berusaha mempertahankan lokasi tempat berdagang agar konsumen mengenali lokasinya.

Temuan studi mengenai pola pelayanan dalam berdagang adalah menetap dan semi menetap. Umumnya pedagang di BKT memiliki pola pelayanan semi menetap sebesar 90% dan menetap hanya 10%. Sepanjang Koridor Inspeksi BKT pada malam hari digunakan untuk tempat berjualan dalam melakukan aktivitas perdagangan dan jasa. Lahan kosong yang ada di tepi jalan inspeksi pada sisi utara memiliki lebar dua meter dan sisi selatan memiliki lebar sebesar tiga meter merupakan tanah milik negara. Kegiatan pedagang dalam memanfaatkan ruang BKT telah terakomodir dalam produk tata ruang. Hasil analisis juga menunjukkan dari banyaknya pedagang di BKT mencapai 227 pedagang, didominasi menggunakan sarana berdagang berupa gelaran alas yang dilengkapi dengan tenda dapat dirakit/ bongkar pasang.



Gambar 18. Peta sebaran lokasi pola gangguan pada Koridor Jalan Inspeksi Banjir Kanal Timur

IV. KESIMPULAN/RINGKASAN

Kesimpulan pertama terkait analisis pola aktivitas dan perilaku pemanfaatan ruang usaha dari UMKM kaki lima di Banjir Kanal Timur (BKT). Sarana fisik yang digunakan pedagang dalam memanfaatkan ruang dominan/terbanyak adalah sarana gelaran/alas sebanyak 83 sarana dan gerobak sebanyak 69 sarana. Persentase pada masing-masing jenis dagangan yaitu jenis makanan/minuman take away sebesar 27%, jenis fashion pakaian sebesar 25%, dan jenis dagangan

Kesimpulan kedua, didapat setelah mempelajari pola-pola gangguan yang dapat timbul atas pelaksanaan aktivitas usaha yang dilakukan oleh UMKM kaki lima. Pemanfaatan koridor Jalan Inspeksi BKT di Kecamatan Duren Sawit merupakan salah satu contoh dari berkembangnya pola pemanfaatan aktivitas UMKM kaki lima pada suatu infrastruktur yang khusus dibangun sebagai infrastruktur pelengkap BKT. Hal itu membuat pelaku UMKM kaki lima yang tidak terorganisir berdagang dengan cara memanfaatkan lahan yang ada termasuk kawasan di sepanjang koridor Jalan Inspeksi BKT. Pemanfaatan yang dilakukan oleh UMKM kaki lima tersebut berkembang tanpa banyak mendapat pengendalian sehingga

dapat menimbulkan beberapa gangguan serta dampak, tidak hanya kepada fungsi fasilitas yang direncanakan tetapi juga berpengaruh terhadap aktivitas publik lainnya.

Adanya pemanfaatan yang dilakukan oleh pelaku UMKM kaki lima di Koridor Jalan Inspeksi BKT berpotensi menimbulkan gangguan. Gangguan dapat timbul pada waktu sore dan malam hari baik yang berdampak lokal maupun dampaknya dapat merembet pada wilayah lain. Adapun dampak yang dapat terjadi adalah kemacetan lokal yang mengganggu jalur transportasi di JL. Pahlawan Revolusi; akses pintu keluar masuk ke kawasan yang penuh/sesak bukan hanya di lokasi studi tapi dapat merembet pada koridor yang terhubung langsung yakni koridor di Kelurahan Duren Sawit; badan jalan menjadi sempit; dan terjadinya perselisihan.

Rekomendasi dapat dilakukan dengan pengaturan dan pengelolaan pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur sebagai pemangku kepentingan. Guna mengoptimalkan aktivitas masyarakat yakni pelaku UMKM kaki lima pada infrastruktur pelengkap BKT (jalan inspeksi) sehingga diharapkan dapat mengurangi potensi gangguan yang terjadi serta dampaknya. Untuk itu, Pemerintah kota Jakarta Timur bisa melakukan pemberdayaan kepada paguyuban pedagang kaki lima, serta bekerjasama dalam menjaga dan mengelola kawasan strategis lingkungan seperti Kawasan Koridor BKT ini. Pemerintah Kota Jakarta Timur juga perlu melakukan kajian lebih lanjut dengan melakukan kerjasama dengan dinas terkait seperti Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur serta Disnakertrans DKI Jakarta agar kegiatan pedagang dapat terakomodasi secara keseluruhan. Jika ditata dan dikelola dengan baik BKT berpotensi menjadi pusat perbelanjaan busana murah dan objek wisata murah yakni sebagai destinasi wisata kuliner/*streetfood*. Disamping gangguan yang terjadi berkaitan dengan adanya aktivitas UMKM kaki lima ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal ketenagakerjaan, hingga berpotensi untuk ekonomi wilayah Kecamatan Duren Sawit.

Sesuai dengan hasil temuan studi di lapangan adanya pengaturan waktu dalam pemanfaatan ruang untuk pelaku UMKM kaki lima dan sistem pop up yang berlaku sebaiknya dipertahankan sebagai bentuk preventif ketidaksesuaian dalam memanfaatkan Koridor Inspeksi BKT. Selain pengaturan waktu, harus dilakukan pengaturan yang lebih baik yakni dapat dilakukan dengan pengaturan secara eksplisit oleh pemangku kepentingan Bappeda dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Seperti dari perda mengenai keberadaan PKL, izin berjualan, dan juga sanksinya sesuai dengan produk tata ruang yang ada. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menyeimbangkan antara tujuan awal didirikannya BKT dengan aktivitas yang berkembang saat ini agar semua itu dapat terakomodasi dan berjalan dengan baik.

Perlu juga melakukan optimalisasi pedagang pada sisi utara BKT yang termasuk pedagang tidak terorganisir untuk meminimalisir gangguan dan dampak yang ditimbulkan. Kegiatan optimalisasi dapat dilakukan dengan tujuan menegakkan perda oleh pihak ketertiban Satpol PP. Namun, dalam optimalisasi pedagang yang tidak terorganisir perlu dilakukan secara humanis memperhatikan kondisi pedagang-pedagang kecil misalnya dengan penarikan retribusi yang terarah bukan dengan pengangkutan paksa atau digusur

begitu saja. Hasil dari retribusi dapat dijadikan pelatihan dan pembinaan UMKM mengenai pengelolaan manajemen keuangan, pembangunan prasarana umum seperti WC umum dan tempat parkir, serta bisa digunakan sebagai pengadaan tanaman-tanaman yang berguna untuk penghijauan ruang terbuka publik.

Studi lanjutan juga dapat dilakukan untuk merumuskan strategi pengurangan potensi gangguan dan dampak yang ditimbulkan, dimana berkaitan dengan alternatif-alternatif tindakan secara mendalam untuk mereduksi/mengurangi gangguan yang timbul. Selain itu, perumusan strategi pengaturan dan pengelolaan dalam pemanfaatan fasilitas pelengkap BKT untuk pengembangan kegiatan ekonomi dengan tidak menghalangi pemenuhan kebutuhan sebenarnya dan tidak menimbulkan gangguan kepada aktivitas publik lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua dosen Program Studi Diploma 3 Perencanaan Wilayah dan Kota K. Pekalongan yang telah membimbing jalannya penelitian tentang UMKM ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] O. Shalih, M. Khaerunnisa, dan A. Safrizal, "ANALISIS FUNGSI BANJIR KANAL TIMUR : Dalam Menanggulangi Banjir di Wilayah DKI Jakarta bagian Timur," no. December 2019, 2020.
- [2] R. Widjajanti, "Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Jalan Kartini, Semarang," vol. 1, no. 3, hal. 151–160, 2015.
- [3] M. C. Buana, M. R. T. Triwicaksono, dan D. Hantono, "Penggunaan Kawasan Tepi Sungai oleh Pedagang Pasar Informal pada Banjir Kanal Timur (BKT) di Jakarta," no. July, hal. 171–177, 2020.
- [4] D. Chamdany, "Kajian dan Arahan Pengembangan Ruang Publik Oleh aktivitas PKL di Kawasan Stadion Manahan Kota Surakarta," Diponegoro University, 2004.
- [5] Budiyo, "Kajian Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Sebagai Sarana Ruang Publik (Studi Kasus Kawasan Sentra Timur DKI Jakarta)," 2006.
- [6] S. S. Nusa dan J. Ernawati, "Pola Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Ngrowo Waterfront Tulungagung," *J. Mhs. Jur. Arsit. Univ. Brawijaya*, 2019, [Daring]. Tersedia pada: <http://arsitektur.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jma/article/view/728>.
- [7] M. S. Sugi, R. L. . Sela, I. J. Moniaga, dan S. Tilaar, "Identifikasi Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik di Kawasan Permukiman Padat Kelurahan Sindulang I Kota Manado," vol. 5, no. 1, hal. 35–39, 2013.
- [8] D. T. Haryanti, "Kajian Pola Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik Kawasan Bundaran Simpang Lima Semarang," Diponegoro University, 2008.
- [9] R. Hakim, *Komponen Perancangan Arsitektur Lanskap*. Bumi Aksara, 2012.
- [10] I. D. M. D. Tanaya, "Aktivitas Ekonomi dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau Aktif di Kota Denpasar," 2016.
- [11] N. Satyahadewi dan N. N. Debatara, "Kajian Penataan PKL Berdasarkan Preferensi dan Persepsi Masyarakat di Kawasan Pasar Sudirman Pontianak," no. November, hal. 978–979, 2013.
- [12] Sumarwanto, "Pengaruh Pedagang Kaki Lima Terhadap Kesenangan dan Ruang Publik Kota Semarang," hal. 84–92, 2012, [Daring]. Tersedia pada: Pedagang kaki lima, kesenangan kota, ruang publik.
- [13] T. G. McGee dan Y. M. Yeung, *Hawkers in Southeast Asian Cities (planning for the Bazaar Economy)*. Ottawa: IDRC, 1977.
- [14] R. A. Kusumaputra, *Banjir Kanal Timur: karya anak bangsa*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- [15] Y. Sentosa, Ruqmalida, dan R. Sakinah, "Penataan Ruang Terbuka Publik Kawasan Pasar Aceh Sebagai Destinasi Wisata di Banda Aceh," 2019.

- [16] Z. Ramadhayanti, "Implementasi Kebijakan Pengendalian Banjir Provinsi Dki Jakarta Melalui Proyek Kanal Banjir Timur," hal. 1–22, 2014.
- [17] O. L. Surya, "Kajian Karakteristik Berlokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Sekitar Fasilitas Kesehatan (Studi Kasus : Rumah Sakit dr . Kariadi Kota Semarang)," Diponegoro University, 2006.